

Transformasi Model Kebijakan dan Perencanaan Strategis dalam Sistem Pendidikan

Khusnan Iskandar
cak.kus.305@gmail.com
Institut Kiai Abdullah Faqih Gresik

Abstract:

This article aims to explain the transformation of policy models and strategic planning in the education system which is studied theoretically based on the rules of writing scientific papers. The analysis method used in this article is a literature study and qualitative data analysis content regarding learning outcomes. The results of this study show that education policy is a product that is used as a guide for making educational decisions that are legal-neutral and moderately adjusted to the educational life environment. Meanwhile, strategic planning is the process carried out by an organization to determine a strategy or direction, as well as make decisions to allocate resources including capital and human resources. The model transformation of these two things includes institutional models, system models, investigation models, rational models, incremental models, policy analysis models, and public policy implementation approach models. The educational strategy planning models are divided into four, namely: Comprehensive planning model, Target Setting Model, Financing and cost-effectiveness model, PPBS (*planning, programming, budgeting system*) model.

Keywords: *Policy Model; Strategic Planning; Education system.*

Pendahuluan

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yaitu sebuah aturan dan juga keputusan yang dibuat oleh pihak tertentu (pemerintah) berdasarkan beberapa pertimbangan guna mengatur atau mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), demi kepentingan umum, masyarakat, penduduk dan pihak-pihak yang terlibat agar diperoleh hasil yang optimal. Kebijakan yang telah dibuat melalui tahapan-tahapan diantaranya pembuatan suatu kebijakan, berawal dari perencanaan, agenda kebijakan, latar belakang sebuah kebijakan dibuat, dan dilanjutkan pengesahan lalu ke tahap pelaksanaan atau implementasi, dan berakhir dengan penilaian.

Dalam kehidupan, pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia baik dari kalangan anak-anak, remaja, maupun dewasa, sebab pendidikan merupakan tolok ukur yang akan membawa manusia kearah masa depan. Dengan adanya pendidikan itu sendiri kita dapat mengetahui kepentingan dalam perkembangan pada diri manusia yang meliputi tingkah laku, sifat, sikap, watak, yang semua itu akan sangat mempengaruhi dan berdampak pada diri manusia, serta bangsa dan Negara. Hal tersebut membuktikan bahwa Negara sangat membutuhkan manusia-manusia atau orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi, agar dapat mencetak generasi yang selalu berfikir dan bekerja cerdas, cermat dan tuntas, memiliki pola pikir yang logis, kritis, kreatif dan inovatif juga orang-orang yang memiliki karakter, semangat, berbudi luhur, sopan santun, dan sifat antusias yang tinggi. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

Dalam dunia pendidikan setiap Negara memiliki visi misi serta tujuan masing-masing. Dimana kedua harapan tersebut akan dapat berjalan dengan baik atau dapat dikatakan berhasil manakala setiap perwujudan diselenggarakan sesuai sistem ataupun aturan pendidikan dengan baik. Yang nantinya akan berpengaruh pada peserta didik yang memiliki jiwa memajukan bangsa, baik dari segi karakter bangsa dan kecerdasan bangsa yang akan menciptakan bangsa mampu bersaing unggul dalam persaingan bangsa. Oleh sebab itu potret pendidikan itu sendiri tidak lain dibawah tanggung jawab suatu Negara. Dimana aturan yang berkenaan dengan pendidikan diatur dalam kebijakan pendidikan.

Engkoswara mengatakan, "Administrasi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari penataan sumber daya manusia yaitu, kurikulum dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan penciptaan suasana yang baik bagi manusia dalam mencapai tujuan pendidikan".² Didalam administrasi pendidikan terdapat kebijakan pendidikan yang digunakan dalam dunia pendidikan atau persekolah tentunya. Kebijakan disamakan dengan rencana dan program, bahkan sering tidak dibedakan antara perbuatan kebijakan atau

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3

² Yusak Burhanuddin, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hal. 12

pembuatan kebijakan. Tidak hanya itu di dalam kebijakan pendidikan juga terdapat pendekatan dan model-model kebijakan yang digunakan dalam pendidikan. Semuanya ini saling berkaitan guna mencapai suatu tujuan pendidikan.

Dalam suatu kegiatan kebijakan, perencanaan adalah faktor yang sangat penting dan strategis sifatnya sebagai pemandu arah bagi pelaksanaan suatu kegiatan dalam rangka mencapai tujuan/asaran/target yang diinginkan. Perencanaan sebagai suatu rangkaian proses kegiatan, dilakukan untuk menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi dan apa yang akan dilakukan. Pada dasarnya perencanaan memiliki makna yang sangat kompleks. Perencanaan dapat didefinisikan dalam berbagai macam pengertian, tergantung perspektif yang dipakai serta latar belakang yang memengaruhi seseorang dalam mendefinisikannya. Dalam pengertian yang luas, perencanaan dapat dimaknai sebagai suatu proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam bidang pendidikan, perencanaan merupakan salah satu faktor kunci efektivitas terlaksananya kegiatan pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan bagi setiap jenjang dan jenis pendidikan pada tingkat nasional maupun lokal. Pentingnya perencanaan yang baik dalam bidang pendidikan Islam adalah oleh karena pendidikan diyakini sebagai jalan hidup manusia yang paling baik. Sebagai jalan yang paling baik, pendidikan Islam perlu direncanakan secara baik dan sistematis, sehingga Pendidikan benar-benar dapat menyejahterakan setiap umat manusia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsepsi Kebijakan dan Perencanaan Pendidikan; Suatu Tinjauan Teoritis.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan berarti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tt pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.³ Menurut Kamus Oxford, kebijakan berarti "rencana kegiatan" atau pernyataan-pernyataan tujuan ideal.⁴

Menurut Nichols, bahwa: "kebijakan adalah suatu keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambilan keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang dan rutin yang terprogram atau terkait

³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.3, cet.1.,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 149

⁴ Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 129

dengan aturan-aturan keputusan". Pendapat lain dikemukakan oleh Klein dan Murphy, bahwa: "kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi, kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi".⁵

Hough (1984) juga menegaskan sejumlah arti kebijakan. Kebijakan bisa menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan. Duke dan Canady mengelaborasi konsep kebijakan dengan delapan arah pemaknaan kebijakan, yaitu: (1) kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan, (2) kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya, (3) kebijakan sebagai panduan tindakan diskresional, (4) kebijakan sebagai strategi yang diambil untuk memecahkan masalah, (5) kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi, (6) kebijakan sebagai norma perilaku dengan ciri konsistensi, dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substantive, (7) kebijakan sebagai keluaran sistem pembuatan kebijakan, dan (8) kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan, yang menunjuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi sistem.⁶

Dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tujuan, rencana, program-program yang dibuat untuk menjadi pedoman ketika melakukan kegiatan atau mengambil keputusan di mana kebijakan tersebut memiliki sanksi jika tidak dilaksanakan.

Sementara, kebijakan pendidikan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dijabarkan di dalam berbagai kebijakan pendidikan.⁷ Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu secara khusus Sekolah Dasar.⁸

Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus,⁹ yakni: a) Memiliki tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan,

⁵ Fachruddin. dkk, *Administrasi Pendidikan: Menata Pendidikan untuk Kependidikan Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hal. 146

⁶ Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 3

⁷ H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 7

⁸ Muchlis, *Kebijakan Publik*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2022) hal

⁹ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) hal

namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan. b) Memenuhi aspek legal-formal. Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga, dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat. c) Memiliki konsep operasional. Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan. d) Dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan. e) Dapat dievaluasi. Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki atau dievaluasi. e) Memiliki sistematika. Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem juga, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan nasional adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal-netral dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara moderat. Fungsi kebijakan pendidikan yaitu kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang pendidikan atau organisasi.

Adapun perencanaan pendidikan sendiri adalah suatu proses menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai, sumber sumber yang akan diberdayakan, dan teknik atau metode akan dipilih secara tepat untuk melaksanakan tindakan selama kurun waktu tertentu agar penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan bermutu.

Kemendikbud, mengemukakan langkah-langkah yang ditempuh dalam proses penyusunan perencanaan pendidikan yaitu: Pengumpulan dan pengolahan data, Diagnosis, Perumusan kebijakan, Perkiraan kebutuhan masa depan, Perhitungan biaya, Penetapan sasaran, Perumusan rencana, Perincian rencana, Implementasi rencana, Evaluasi rencana, dan Revisi rencana. Dengan adanya langkah-langkah perencanaan pendidikan tersebut diharapkan pendidikan di Indonesia akan semakin maju. Masalah pendidikan di Indonesia seakan menjadi masalah pula untuk pemerintah dalam merencanakan Sistem Pendidikan Nasional. Sistem Pendidikan Nasional selama ini seakan belum meng-cover tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional begitu mulia, tetapi implementasinya tidak sanggup mewujudkannya. Perencanaan sistem pendidikan ini akan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, apabila masalah dalam pendidikan yang telah dibahas dapat teratasi.¹⁰

Perencanaan juga dapat didefinisikan sebagai proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar atau tolok ukur keberhasilan sesuatu kegiatan.¹¹ Pengertian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan merupakan proses atau rangkaian beberapa kegiatan yang saling berhubungan dalam memilih salah satu di antara beberapa alternatif tentang tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Kemudian memilih strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara itu, menurut Ritha F. Dalimunthe¹² perencanaan adalah pemilihan dan penetapan kegiatan, selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan; rencana haruslah diimplementasikan. Setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan, rencana- rencana mungkin memerlukan perbaikan agar tetap berguna. "Perencanaan kembali" kadang-kadang dapat menjadi faktor kunci agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi baru secepat mungkin.

¹⁰https://www.researchgate.net/publication/335504424_Teknik_dan_Model_Perencanaan_Pendidikan 10

¹¹ Hadari Nawawi. *Perencanaan SDM untuk Organisasi Profit*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University). 2001

¹² Ritha F Dalimunthe, *Keterkaitan antara Penelitian Manajemen dengan Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Manajemen*. (Medan: Universitas Sumatra Utara), 2003

Conyers & Hills¹³ mendefinisikan “perencanaan” sebagai “suatu proses yang bersinambungan”, yang mencakup “keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.” Dari pengertian-pengertian tersebut, maka perencanaan pendidikan dimaksudkan untuk mempersiapkan semua komponen pendidikan, agar dapat terlaksana proses belajar mengajar yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan dalam mencapai sasaran keluaran pendidikan seperti yang diharapkan. Pengorganisasian pendidikan ditujukan untuk menghimpun semua potensi komponen pendidikan dalam suatu organisasi yang sinergis untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya.

Menurut John R. Kelly¹⁴ perencanaan pendidikan hendaknya mengedepankan 4 unsur dasar perencanaan, yaitu:

- a. **Pemilihan.** Merencanakan berarti memilih. Perencanaan merupakan proses memilih di antara berbagai kegiatan yang diinginkan, karena tidak semua yang diinginkan itu dapat dilakukan dan dicapai dalam waktu yang bersamaan. Hal itu menyiratkan bahwa hubungan antara perencanaan dan proses pengambilan keputusan sangat erat. Oleh karena itu, banyak buku mengenai perencanaan membahas pendekatan-pendekatan alternatif dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan urutan tindakan di dalam proses pengambilan keputusan;
- b. **Sumber Daya.** Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. Penggunaan istilah sumber daya di sini menunjukkan segala sesuatu yang dianggap berguna dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Sumber daya di sini mencakup sumber daya manusia; sumber daya alam, sumber daya modal dan keuangan. Perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana sumber daya yang tersedia itu digunakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas sumber daya tersebut sangat berpengaruh dalam proses memilih di antara berbagai pilihan tindakan yang ada;
- c. **Tujuan.** Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh seorang perencana adalah bahwa tujuan-tujuan mereka kurang dapat dirumuskan secara tepat. Sering kali tujuan-tujuan tersebut didefinisikan

¹³ Conyers & Hills, *Creative Human Resource Planning and Applications : A Strategic Approach.*(New York Prectice Hall, Inc), 1994.

¹⁴ John R. Kelly. 1993. *Leisure.* Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc.

secara kurang tegas, karena kadang kala tujuan-tujuan tersebut ditetapkan oleh pihak lain.; dan

- d. **Waktu.** Perencanaan mengacu ke masa depan. Salah satu unsur penting dalam perencanaan adalah unsur waktu. Tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, perencanaan berkaitan dengan masa depan.

Kegiatan pendidikan adalah pelaksanaan dari penyelenggaraan pendidikan yang telah direncanakan dan diselenggarakan oleh organisasi penyelenggara pendidikan dengan memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam perencanaan dalam rangka mencapai hasil keluaran pendidikan yang optimal. Pengendalian pendidikan dimaksudkan untuk menjaga agar penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sesuai yang direncanakan dan semua komponen pendidikan digerakkan secara sinergis dalam proses yang mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan yang dijabarkan dalam sasaran-sasaran menghasilkan keluaran secara optimal seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan pendidikan.

Model-model Kebijakan dalam Pendidikan

Setiap model memiliki fokus yang berbeda tentang kondisi politik dan membantu memahami berbagai perbedaan tentang kebijakan publik. Ada beberapa pendapat para ahli tentang model dalam hal pembuatan kebijakan. Menurut Yhezkkel Dror,¹⁵ terdapat beberapa model kebijakan, antara lain:

- a. Pure Rationality Model, yaitu model pembuatan kebijakan yang didasarkan pada rasionalitas murni dalam pembuatan model.
- b. Economically Rationality Model. Model pembuatan kebijakan yang didasarkan pada penekanan efisiensi dan ekonomis.
- c. Sequential-Decision Model. Model pembuatan kebijakan yang didasarkan pada pembuatan eksperimen untuk penentuan alternatif sehingga tercapai keputusan yang paling efektif.
- d. Incremental Model. Model pembuatan kebijakan yang didasarkan pada perubahan sedikit demi sedikit.
- e. Satisficing Model. Model pembuatan kebijakan yang didasarkan pada alternatif pertama yang paling memuaskan
- f. Extra-Rational Model. Model pembuatan kebijakan yang didasarkan pada yang paling rasional dan paling optimal
- g. Optimal Model. kebijakan dengan model integratif, yaitu kebijakan kepada identifikasi masalah, kegunaan praktis, memperhatikan alokasi sumber-

¹⁵ Khairi, *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. (Atmospheric Environment, 42(13) 2008), 2934-2947

sumber, penentuan tujuan yang akan dicapai, pemilihan alternatif program, peramalan hasil dan mengevaluasi alternatif terbaik.

Sedangkan dalam pendidikan, ada beberapa model perumusan kebijakan pendidikan yaitu model kelembagaan, model sistem, model penyelidikan, model rasional, model inkrementalis, model analisis kebijakan, dan model pendekatan implementasi kebijakan publik. Adapun pembahasannya sebagai berikut:

Model Kelembagaan

Model kelembagaan ini berprinsip bahwa pemerintah adalah penanggung jawab pembuatan kebijakan.¹⁶ Apapun yang dihasilkan oleh pemerintah merupakan kebijakan publik. Model kelembagaan ini didasari oleh fungsi kelembagaan dari setiap sektor pemerintah dalam merumuskan kebijakan.¹⁷ Pemberian kebijakan oleh pemerintah dicirikan dengan lembaga negara memberikan legitimasi, kebijakan negara bersifat universal dan kebijakan tersebut dapat dimonopoli dan dipaksakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Hal ini selaras dengan pendapat yang menyatakan bahwa model lembaga merupakan model yang digunakan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan.¹⁸ Maka oleh sebab itu model kelembagaan ini dapat diterapkan dalam merumuskan kebijakan pendidikan di sektor pemerintah.

Model kelembagaan ini memiliki keunggulan yaitu pemerintah dapat menuntun masyarakat untuk dapat melaksanakan kebijakan melalui kekuatan dan monopoli kekuasaan yang sah. Namun model ini juga memiliki kelemahan yaitu model ini tidak memperhatikan hubungan antar lembaga dan substansi dari kebijakan itu sendiri.

Model Sistem

Model sistem ini dikembangkan oleh ahli yang bernama Paine dan Naumes.¹⁹ Model sistem merupakan model yang menggambarkan kejadian nyata yang terjadi saat pembuatan kebijakan. Model sistem ini disebut juga

¹⁶ Wibowo, L. R. (2013). Analisis Kebijakan Publik Pengembangan Model Kelembagaan Kompensasi Das Ciliwung (Public policy analysis on the development of a compensation institution model at Ciliwung Watershed). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 20(3), 353-366

¹⁷ Nuraini, C., Darwanto, D. H., Masyhuri, M., & Jamhari, J. (2016). Model Kelembagaan pada Agribisnis Padi Organik Kabupaten Tasikmalaya. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 2(1), 9-16.

¹⁸ Fatem, S. M., Maryudi, A., Pudyatmoko, S., & Marwa, J. (2020). Model Kelembagaan Lokal Kabupaten Konservasi Tambrauw di Papua Barat. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 14(2), 167-184.

¹⁹ Triastuti, M. R. H. (2003). Analisis Formulasi Kebijakan Kenaikan Tarif Listrik, Telepon dan BBM di Tahun 2003: Disintegrate System Model of Public Policy Toward Organizational Learning and Policy Change. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 1-10.

dengan model deskriptif. Model sistem ini dirumuskan dari sudut pandang pembuat kebijakan. Dalam merumuskan kebijakan dengan model ini pembuat kebijakan dilihat perannya dari proses perancangan maupun pengkoordinasian dalam menemukan pemecahan masalah yang akan 1) memformulasikan kesempatan dan menggunakan bantuan dari aspek internal maupun aspek internal, 2) memberikan kepuasan sesuai dengan permintaan lingkungan, dan 3) dapat memberikan kepuasan terhadap pembuat kebijakan.²⁰

Model sistem mendeskripsikan bahwa adanya interaksi antara pembuat kebijakan dan lingkungan sebagai hal yang dinamis. Interaksi tersebut dapat berbentuk inputs dan outputs. Outputs yang dihasilkan akan menjadi bahagian dari lingkungan yang akan melakukan interaksi dengan organisasi. Model sistem mempercayai bahwa kebijakan politik yang timbul dari interaksi dianggap sebagai masukan sedangkan yang dikeluarkan merupakan respon dari setiap tuntutan yang dianggap sebagai luaran sistem politik. Agar setiap tuntutan dapat menjadi kebijakan maka diperlukan penyelesaian dari pihak-pihak yang bertentangan. Maka sebuah sistem dapat dibangun dari aspek-aspek yang mendukung sistem tersebut. Selain itu juga di dukung oleh sub sistem yang saling berhubungan.²¹ Dengan saling berinteraksinya sebuah sistem maka sistem tersebut akan menghasilkan luaran yang jelas, memiliki akar-akar sistem yang kuat, dan memiliki penggunaan yang bersifat otoritas.²² Maka dari penjabaran model sistem tersebut maka model sistem dapat di aplikasikan pada kebijakan pendidikan namun perlu adanya keikutsertaan masyarakat secara menyeluruh agar dapat memetakan permasalahan untuk dicarikan solusi yang tepat.

Model sistem memiliki kelebihan yaitu memiliki input dan proses yang jelas dan sesuai prosedur sehingga menghasilkan output yang jelas. Sedangkan efisiensi waktu menjadi kelemahan dari model ini dikarenakan membutuhkan waktu yang banyak dalam menampung input dan melaksanakan proses sebelum dilahirkannya kebijakan

Model Penyelidikan Campuran

Model penyelidikan campuran disebut juga dengan model mixed scanning yang menggunakan aspek-aspek dari dua pendekatan maupun dua sudut

²⁰ Paine, F. T., & Naumes, W. (1975). *Organizational strategy & policy*. Saunders.

²¹ Walukow, A. F. (2012). Analisis Kebijakan Penurunan Luas Hutan Di Daerah Aliran Sungai Sentani Berwawasan Lingkungan (Environmental Based of Policy Analysis About the Decrease of Forest Area in Sentani Watershed). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 19(1), 74-84.

²² Toha, M., & Hilmy, M. (2020). Pendidikan Islam di Kota Metropolitan: Studi Kebijakan Penyelenggaraan PAI di Surabaya. *Inteligencia Media*.

pandang. Model penyelidikan campuran menuntut pembuat kebijakan untuk menggunakan teori rasional yang bersifat menyeluruh dan inkrementalisme dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berbeda.²³ Pada beberapa kasus penggunaan pendekatan inkrementalisme sangat tepat untuk digunakan namun pada kasus lainnya pendekatan yang bersifat komprehensif lebih tepat untuk digunakan. Penggunaan model penyelidikan campuran dapat digunakan pada proses kebijakan pendidikan dengan mengambil keputusan yang dilakukan secara inkremental dan rasional.²⁴

Model penyelidikan campuran memiliki kelebihan yaitu melihat dari dua sisi utama dan khusus dalam merumuskan kebijakan sehingga kebijakan yang ditemukan lebih terperinci namun hal ini menjadi kelemahan karena pendidikan permasalahan tersebut hanya difokuskan kepada beberapa daerah saja sehingga banyak daerah yang akan luput dari pantauan.

Model Proses

Model proses mengansumsikan bahwa politik merupakan kegiatan yang memiliki proses. Adapun tahapan perumusan kebijakan dengan model proses yaitu mengidentifikasi masalah, menyusun agenda, merumuskan perancangan kebijakan, pengesahan kebijakan, penerapan kebijakan, dan penilaian kebijakan.²⁵ Penerapan model proses ini dalam kebijakan pendidikan dapat dilaksanakan dengan mengikuti setiap tahapan agar mendapatkan kebijakan yang tepat.

Model proses memiliki kelebihan yaitu kebijakan yang lahir merupakan bentuk kefokuskan terhadap elemen irasional perumus kebijakan dengan memperhatikan setiap kebutuhan masyarakat namun yang menjadi kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang lama hingga kebijakan dapat di sahkan.

Model Teori Elite

Teori elite mengasumsikan bahwa masyarakat terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok pemegang kekuasaan (penguasa/ elite) dan kelompok yang tidak memegang kekuasaan (masa).²⁶ Teori elite ini berpadangan bahwa

²³ Mulyana, Y., Huraerah, A., & Martiawan, R. (2019). Kebijakan pengembangan destinasi pariwisata Cianjur Selatan di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(1), 490-511.

²⁴ Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195-224.

²⁵ Thomas R. (2011). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.

²⁶ Suryono, A. (2014). Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 98-102.

demokrasi yang dijalankan secara penuh akan memungkinkan adanya bias dalam merumuskan kebijakan. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dihasilkan merupakan bagian dari preferensi politik kaum elite.²⁷ Model ini lebih banyak mempertimbangkan kepentingan elit dibandingkan tuntutan dari masyarakat. Maka isu kebijakan yang akan dimasukkan dalam proses perumusan kebijakan pendidikan menjadi hasil konflik dan kesepakatan dari kaum elit politik tersebut sedangkan masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk dapat mencampuri kebijakan yang dihasilkan. Oleh sebab itu perlunya kebijaksanaan kaum elit politik untuk dapat merumuskan kebijakan yang berlandaskan kepentingan umum.

Model elit memiliki kelebihan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih cepat yang dilandasi dengan konsep dan teori pakar ahli namun kebijakan tersebut tidak di tampung dari bawah sehingga masyarakat hanya mengetahui bahwa kebijakan telah ada dan wajib untuk dilaksanakan.

Model Rasional

Model rasional merupakan kebijakan yang didapatkan dari perolehan sosial maksimum. Artinya bahwa model rasional yang digunakan oleh pemerintah harus mampu untuk menghasilkan kebermanfaatannya yang maksimal bagi masyarakat.²⁸ Teori ini mempreskripsikan berbagai bentuk prosedur dalam mengambil keputusan yang diperoleh dari cara yang dianggap efisien dalam merumuskan kebijakan. Model rasional berasal dari pemikiran rasionalisme dan positifisme yang bersifat ilmiah.²⁹ Hal ini dikarenakan model rasional meyakini bahwa permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan melalui metode yang ilmiah dan rasional. Maka dapat disimpulkan bahwa keputusan publik tidak mengoptimalkan manfaat di atas bebas namun hanya memenuhi kriteria pembuat kebijakan sedangkan rasionalitas manusia memiliki keterbatasan.

Model rasional memiliki kelebihan yaitu kebijakan yang akan dilahirkan sesuai dengan kondisi dilapangan namun model ini memiliki kelemahan yaitu keterbatasan rasional intelektual dari sipembuat kebijakan.

Model Inkrementalis

Model inkrementalis merupakan bentuk dari kritik model rasional. Model ini beranggapan bahwa pembuat kebijakan tidak memungkinkan melaksanakan

²⁷ Sjoraida, D. F. (2017). Urgensi unsur elit dalam pelaksanaan kebijakan informasi publik di Jawa Barat. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 2(2), 1-10.

²⁸ Latifa, A. (2016). Aplikasi Model Pengambilan Keputusan Dalam Perilaku Fertilitas. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 5(1), 55-73.

²⁹ Susanto, R. (2016). Hubungan Pengambilan Keputusan Rasional Dengan Akuntabilitas Kepemimpinan Kepala Sekolah. *Eduscience: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2 (1), 22, 39.

proses seperti model rasional dikarenakan adanya keterbatasan pada pembuat kebijakan seperti keterbatasan waktu, intelektual dan biaya.³⁰ Model ini melakukan penyesuaian dengan realitas kehidupan demokratis dan pluralitas serta keterbatasan yang dimiliki manusia. Model ini berlandaskan bahwa adanya perubahan inkrementalis mengakibatkan adanya proses keamanan apabila terjadinya perubahan kebijakan. Segala bentuk pengetahuan yang dipercaya dilandaskan kepada satu-satunya acara untuk memperoleh keputusan tanpa memunculkan resiko.³¹ Maka secara umum dapat disimpulkan bahwa model inkrementalis merupakan model yang yang tidak melakukan proses sehingga kurang tepat digunakan dalam proses perumusan kebijakan dikarenakan kebijakan dalam pendidikan bersifat kontiniu dan memakan waktu yang lama.

Model inkremantalis memiliki kelebihan yaitu kebijakan yang dilahirkan lebih cepat karena kebijakan yang dilahirkan merupakan kebijakan yang dianggap paling tepat tanpa memikirkan alternatif lainnya namun yang menjadi kelemahannya adalah kebijakan hanya dapat diterapkan pada permasalahan yang bersifat rutin.

Model-model Perencanaan Strategis Pendidikan

Menurut T Hani Handoko Perencanaan strategis (*strategic planning*) adalah proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, program-program strategi, dan penetapan metoda-metoda yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan. Perencanaan strategi juga merupakan proses perencanaan jangka panjang yang disusun untuk mencapai tujuan organisasi.³² Perencanaan strategis yaitu proses analisis, perumusan dan evaluasi strategi-strategi, dengan tujuan utama agar lembaga pendidikan dapat melihat secara obyektif kondisi-kondisi internal dan eksternal sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal.³³

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities,*

³⁰ Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.

³¹ Maulana, H. F., Mayunita, S., Hastuti, H., & Wijaya, A. A. M. (2018). Diskurusus Kebijakan Publik Model Incremental. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 1(2), 1-13.

³² Hani Handoko. *Manajemen*. (Jakarta: Erlangga. 1996) hal

³³ Ravik Karsidi, MS. <http://happytreeflash.com/manajemen-strategis-ppt.html>.

Threats), PEST (*Political, Economic, Social, Technological*), atau STEER (*Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory*). Rencana strategis pendidikan adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana pendidikan akan diarahkan, dan bagaimana sumberdaya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu. Organisasi membutuhkan alat untuk mengembangkan strategi manajemen yang menjamin tercapainya kinerja optimal kedepan. Organisasi membutuhkan sebuah kerangka kerja dalam rangka: Mengelola suatu perubahan kedepan, Mengelola situasi yang sangat kompleks, Mengembangkan arah, Tujuan dan program strategis, mengintegrasikan unsur belajar bersama kedalam proses perencanaan.³⁴

Dalam implementasi strategi, lembaga pendidikan merumuskan tujuan pendidikan tahunan, merumuskan kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya, sehingga strategi yang telah di formulasi dapat dilaksanakan. Implementasi berarti menggerakkan para karyawan dan manajer untuk menempatkan strategi menjadi tindakan nyata. Implementasi strategi memerlukan kinerja dan disiplin tinggi tetapi juga diimbangi dengan kompensasi berimbang. Tantangan implementasi adalah menstimulir para manajer dan karyawan melalui organisasi agar mau bekerja dengan penuh kebanggaan dan antusias pencapaian tujuan.

Adapun model-model perencanaan strategi pendidikan, Nanang Fatah³⁵ mengelompokkan perencanaan pendidikan ke dalam empat kelompok sebagai berikut:

- a. **Model perencanaan komprehensif.** Model ini digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, dan juga berfungsi sebagai patokan dalam menjabarkan rencana-rencana ke arah tujuan yang lebih luas.
- b. **Model target setting.** Model ini diperlukan dalam upaya melaksanakan proyeksi ataupun memerkirakan tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Dalam persiapannya dikenal (1) model untuk analisis demografis dan proyeksi penduduk; (2) model untuk memproyeksikan *enrolment* (jumlah siswa terdaftar) sekolah; (3) model untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja.
- c. **Model pembiayaan dan keefektifan biaya.** Model ini sering digunakan untuk menganalisis proyek-proyek dalam kriteria efisien dan efektifitas ekonomis. Dengan model ini dapat diketahui proyek yang paling fleksibel

³⁴ Ravik Karsidi...

³⁵ Nanang Fatah. *Landasan Manajemen Pendidikan*. (Bandung: Rosdakarya. 2004) hal.

dan memberikan suatu perbandingan yang paling baik di antara proyek-proyek yang menjadi alternatif penanggulangan masalah yang dihadapi.

- d. **Model PBBS.** PBBS (*planning, programming, budgeting system*) bermakna bahwa perencanaan, penyusunan program dan penganggaran dipandang sebagai suatu sistem yang tak terpisahkan satu sama lainnya.

Kesimpulan

Kebijakan pendidikan adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal-netral dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara moderat. Fungsi kebijakan pendidikan yaitu kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang pendidikan atau organisasi. Sedangkan perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), PEST (*Political, Economic, Social, Technological*), atau STEER (*Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, rencana strategis pendidikan adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana pendidikan akan diarahkan, dan bagaimana sumberdaya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu.

Model-model perumusan kebijakan pendidikan terbagi menjadi tujuh, yaitu model kelembagaan, model sistem, model penyelidikan, model rasional, model inkrementalis, model analisis kebijakan, dan model pendekatan implementasi kebijakan publik. Adapun model-model perencanaan strategi pendidikan terbagi menjadi empat, yaitu: Model perencanaan komprehensif, Model Target Setting, Model pembiayaan dan keefektifan biaya, Model PPBS (*planning, programming, budgeting system*).

Daftar Pustaka

- Conyers & Hills, *Creative Human Resource Planning and Applications : A Strategic Approach*.(New York Prectice Hall, Inc), 1994.
- Fatem, S. M., Maryudi, A., Pudyatmoko, S., & Marwa, J. (2020). Model Kelembagaan Lokal Kabupaten Konservasi Tambrauw di Papua Barat. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 14(2), 167-184.
- Fachruddin. dkk, *Administrasi Pendidikan: Menata Pendidikan untuk Kependidikan Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010)
- Hadari Nawawi. *Perencanaan SDM untuk Organiasi Profit*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2001)
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Hani Handoko. *Manajemen*. (Jakarta: Erlangga. 1996)
- H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195-224.
- John R. Kelly. 1993. *Leisure*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc.
- Khairi, *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. (*Atmospheric Environment*, 42(13) 2008), 2934-2947
- Latifa, A. (2016). Aplikasi Model Pengambilan Keputusan Dalam Perilaku Fertilitas. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 5(1), 55-73.
- Maulana, H. F., Mayunita, S., Hastuti, H., & Wijaya, A. A. M. (2018). Diskurusus Kebijakan Publik Model Incremental. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 1(2), 1-13.
- Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010)
- Mulyana, Y., Huraerah, A., & Martiawan, R. (2019). Kebijakan pengembangan destinasi pariwisata Cianjur Selatan di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(1), 490-511.
- Muchlis, *Kebijakan Publik*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2022)
- Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012)
- Nanang Fatah. *Landasan Manajemen Pendidikan*. (Bandung: Rosdakarya. 2004)
- Nuraini, C., Darwanto, D. H., Masyhuri, M., & Jamhari, J. (2016). Model Kelembagaan pada Agribisnis Padi Organik Kabupaten Tasikmalaya. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 2(1), 9-16.

- Paine, F. T., & Naumes, W. (1975). *Organizational strategy & policy*. Saunders.
- Ravik Karsidi, MS. <http://happytreeflash.com/manajemen-strategis-ppt.html>.
- Ritha F Dalimunthe, *Keterkaitan antara Penelitian Manajemen dengan Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Manajemen*. (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2003)
- Suryono, A. (2014). Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 98-102.
- Sjoraida, D. F. (2017). Urgensi unsur elit dalam pelaksanaan kebijakan informasi publik di Jawa Barat. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 2(2), 1-10.
- Susanto, R. (2016). Hubungan Pengambilan Keputusan Rasional Dengan Akuntabilitas Kepemimpinan Kepala Sekolah. *Eduscience: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2 (1), 22, 39.
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
https://www.researchgate.net/publication/335504424_Teknik_dan_Model_Pencanaan_Pendidikan_10
- Toha, M., & Hilmy, M. (2020). *Pendidikan Islam di Kota Metropolitan: Studi Kebijakan Penyelenggaraan PAI di Surabaya*. Inteligencia Media.
- Thomas R. (2011). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Triastuti, M. R. H. (2003). Analisis Formulasi Kebijakan Kenaikan Tarif Listrik, Telepon dan BBM di Tahun 2003: Disintegrate System Model of Public Policy Toward Organizational Learning and Policy Change. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 1-10.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3
- Wibowo, L. R. (2013). Analisis Kebijakan Publik Pengembangan Model Kelembagaan Kompensasi Das Ciliwung (Public policy analysis on the development of a compensation institution model at Ciliwung Watershed). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 20(3), 353-366
- Walukow, A. F. (2012). Analisis Kebijakan Penurunan Luas Hutan Di Daerah Aliran Sungai Sentani Berwawasan Lingkungan (Environmental Based of Policy Analysis About the Decrease of Forest Area in Sentani Watershed). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 19(1), 74-84.
- Yusak Burhanuddin, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998)
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3, cet.1,, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)